



NORMALISASI HUBUNGAN ARAB SAUDI-IRAN DALAM MENDUKUNG SAUDI VISION 2030

Incha Auseve Benartya¹, Indra Tamsyah^{2*}
Universitas Sriwijaya^{1,2}

Abstract

This research aims to analyse the impact of diplomatic normalization between Saudi Arabia and Iran on the sustainability of Saudi Vision 2030. Utilizing Complex Interdependence Theory as the conceptual framework, this study examines how the changing bilateral dynamics influence the main pillars of the transformative vision: a thriving economy, an ambitious nation, and a vibrant society. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on literature review and secondary data. The findings indicate that the normalization, mediated by China in March 2023, was driven by a mutual awareness that the costs of conflict outweighed the potential gains from competition. The results demonstrate that this normalization significantly supports Saudi Vision 2030 through increased Foreign Direct Investment (FDI), global oil market stabilization, proxy conflict reduction, and tourism growth. Although challenges such as sanctions on Iran and fragile trust persist, this normalization represents an essential pragmatic step towards regional stability and Saudi Arabia's transformative ambitions.

Keywords: Normalization of Relations, Saudi Arabia, Iran, Saudi Vision 2030, Interdependence Theory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran terhadap keberlangsungan Saudi Vision 2030. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Teori Interdependensi Kompleks untuk mengkaji bagaimana perubahan dinamika hubungan kedua negara memengaruhi pilar-pilar utama visi transformasi tersebut, yang meliputi ekonomi yang berkembang, negara yang ambisius, dan masyarakat yang dinamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis yang bersumber pada data sekunder dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi yang dimediasi oleh Tiongkok pada Maret 2023 didorong oleh kesadaran timbal balik bahwa biaya konflik jauh melampaui potensi keuntungan persaingan. Temuan studi mengindikasikan bahwa normalisasi ini secara signifikan mendukung Saudi Vision 2030 melalui peningkatan investasi asing langsung (FDI), stabilisasi pasar minyak global, reduksi konflik proksi, dan peningkatan pariwisata. Meskipun tantangan seperti sanksi Iran dan defisit kepercayaan masih ada, normalisasi ini terbukti menjadi langkah pragmatis esensial bagi ambisi transformatif Arab Saudi.

Kata Kunci: Normalisasi Hubungan, Arab Saudi, Iran, Saudi Vision 2030, Teori Interdependensi.

Pendahuluan

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang mempunyai kekuatan terbesar di Timur Tengah. Hubungan antara Arab Saudi dan Iran memiliki akar sejarah yang panjang, tetapi juga dipenuhi dengan dinamika ketegangan yang melibatkan ideologi, geopolitik, dan konflik sektarian. Pada tahun 1929, kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan Saudi-Iran, yang menjadi dasar hubungan diplomatik awal mereka. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1979, Revolusi Islam Iran menjadi titik balik yang mengubah peta hubungan bilateral kedua negara (Sahide, 2013). Revolusi ini tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Iran menjadi republik Islam berbasis Syiah, tetapi juga memicu konflik ideologis dengan Arab Saudi, yang mendukung kepemimpinan Sunni di dunia Muslim. Perbedaan ini menciptakan rivalitas yang mendalam, dengan kedua negara bersaing untuk mempengaruhi kawasan Timur Tengah.

Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran yang semakin intens dalam beberapa dekade terakhir telah menciptakan dampak luas terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua negara secara aktif terlibat dalam perang proksi di berbagai wilayah, seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon, dengan Iran mendukung kelompok Houthi di Yaman, sementara Arab Saudi

memimpin koalisi militer untuk mempertahankan pemerintahan yang diakui secara internasional. Konflik ini tidak hanya menyebabkan krisis kemanusiaan dengan ribuan korban jiwa dan jutaan pengungsi (Haryono, 2024), tetapi juga memperburuk kerja sama regional. Selain itu, insiden besar seperti eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi pada 2016 dan serangan terhadap kedutaan Saudi di Teheran semakin memperuncing hubungan kedua negara, yang akhirnya menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik selama tujuh tahun.

Selain aspek politik dan keamanan, ketegangan ini turut berdampak pada ekonomi global, terutama sektor energi. Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais pada 2019, yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi dengan dukungan Iran, menyebabkan gangguan produksi minyak sebesar 5,7 juta barel per hari atau sekitar 5% dari pasokan minyak dunia, memicu lonjakan harga minyak global. Destabilisasi politik juga meluas ke negara-negara lain akibat dukungan masing-masing terhadap kelompok yang berseberangan, seperti di Suriah, dimana Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Arab Saudi berpihak pada oposisi, yang memperpanjang perang saudara dan krisis politik. Di Lebanon, ketegangan serupa terjadi akibat dukungan Iran terhadap Hizbullah dan dukungan Saudi terhadap kelompok politik lainnya (Ihsan Hamid dan Adi Setiawan, 2021).

Rivalitas ini juga memperdalam polarisasi sektarian di Timur Tengah, di mana identitas agama sering digunakan untuk memperkuat basis dukungan politik. Ketegangan berbasis sektarian ini memperburuk konflik di Irak, Lebanon, dan Suriah, menghambat upaya rekonsiliasi serta memperpanjang ketidakstabilan di kawasan. Dengan demikian, konflik antara Arab Saudi dan Iran tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral mereka, tetapi juga membawa

implikasi besar bagi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

Di tengah konflik ini, Arab Saudi meluncurkan *Saudi Vision 2030* pada tahun 2016 sebagai upaya transformasi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak dan *Saudi Vision 2030*, yang diadopsi melalui Resolusi Dewan Menteri No. 308 pada 18 Rajab 1437 H (25 April 2016), menjadi pedoman strategis bagi kebijakan publik Arab Saudi. Visi ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kemampuan negara secara optimal melalui tiga pilar utama yaitu ekonomi yang berkembang, negara yang ambisius, dan masyarakat yang dinamis. Ketiga pilar ini bukan sekadar slogan, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan politik strategis yang radikal. 'Masyarakat yang Dinamis' diwujudkan melalui pelonggaran aturan sosial dan reformasi budaya untuk meningkatkan kualitas hidup. 'Ekonomi yang Berkembang' difokuskan pada kebijakan diversifikasi agresif melalui Dana Investasi Publik (PIF) untuk mengakhiri ketergantungan pada minyak. Sementara itu, 'Negara yang Ambisius' diimplementasikan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan (*e-government*), dan transparansi akuntabilitas untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bersih."

Pada 24 April 2016, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS), sebagai pencetus utama *Saudi Vision 2030*, mengeluarkan deklarasi visi tersebut, menandai awal reformasi besar-besaran yang berupaya merevolusi kebijakan domestik Arab Saudi. Reformasi ini mengubah wajah Arab Saudi secara drastis jika dibandingkan dengan era sebelumnya, di mana kebijakan domestik didominasi oleh penegakan hukum syariah yang kaku dan segregasi sosial yang ketat. Sebelumnya, polisi agama (*Mutawa*) memiliki otoritas luas untuk menangkap warga yang dianggap melanggar norma moral, dan kaum perempuan terikat penuh pada sistem perwalian pria (*mahram*) yang membatasi mobilitas mereka.

Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk modernisasi ekonomi tetapi juga mengubah paradigma sosial dan politik. MBS secara signifikan membatasi otoritas polisi agama dengan menempatkan institusi tersebut di bawah kontrol kerajaan dan mencabut hak tangkap mereka. Selain itu, ia meluncurkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk memperluas partisipasi perempuan dalam sektor publik sejak 2017.

Langkah ini membuka akses bagi perempuan ke dalam sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup, seperti militer, pasukan keamanan perbatasan, hingga korps diplomatik. Kebijakan ini terbukti efektif; tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan melonjak drastis dari sekitar 20% pada tahun 2018 menjadi 36% pada tahun 2024, melampaui target awal *Saudi Vision 2030*. Reformasi ini dirancang untuk memodernisasi masyarakat Arab Saudi yang selama ini dikenal konservatif, dengan harapan membuka jalan menuju masa depan yang lebih progresif (Quamar, 2020).

Setiap pilar *Saudi Vision 2030* mengusung berbagai tujuan strategis yang memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, baik secara eksplisit maupun implisit. Reformasi ini mencakup isu-isu penting seperti hak atas keamanan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, serta penguatan hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Untuk merealisasikan visi ini, Arab Saudi mengimplementasikan sejumlah program unggulan, termasuk Program Transformasi Nasional, Program Peningkatan Gaya Hidup, dan Program Pengembangan Industri.

Lebih dari sekadar reformasi ekonomi, *Saudi Vision 2030* mencerminkan ambisi untuk merekonstruksi struktur sosial dan budaya Arab Saudi dengan mengurangi stigma terhadap kelompok konservatif dan fundamentalis. Dengan pendekatan yang menekankan pembangunan berkelanjutan, reformasi ini bertujuan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara modern

yang tidak hanya kompetitif di tingkat global tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya di era globalisasi. Namun, stabilitas regional menjadi elemen kunci dalam implementasi *Saudi Vision 2030*, karena ketegangan yang berkepanjangan dengan Iran berisiko menghambat investor asing dan menciptakan ketidakpastian geopolitik.

Pada tahun 2021 terdapat sinyal positif menuju rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran. Beberapa faktor utama mendorong kedua negara untuk berdamai. Pertama, tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan dan pandemi COVID-19 telah mendorong Arab Saudi dan Iran untuk menyadari pentingnya stabilitas regional demi pembangunan domestik yang berkelanjutan. Arab Saudi, melalui visi ambisius *Saudi Vision 2030*, menghadapi tantangan serius ketika harga minyak dunia anjlok dari lebih dari \$80 per barel menjadi sekitar \$60 per barel pada awal 2024, di bawah titik impas fiskal negara, memaksa pemerintah memangkas belanja dan memperlambat proyek-proyek meganya seperti NEOM. Meskipun upaya diversifikasi terus berjalan, lebih dari 60% pendapatan negara masih bergantung pada sektor minyak. Di sisi lain, Iran mengalami krisis ekonomi yang diperparah oleh sanksi internasional dan dampak pandemi, yang menyebabkan inflasi melonjak hingga 41,1% pada 2019 dan terus membebani ekonomi domestik, memicu ketidakstabilan sosial serta membatasi kemampuan negara dalam mempertahankan pengaruh regionalnya, seperti yang terlihat dari kegagalannya dalam mempertahankan dominasi di Suriah pasca-keruntuhan kekuasaan Assad. Kesadaran bersama terhadap kerentanan ekonomi ini menjadi pendorong utama keduanya untuk menurunkan tensi dan menjajaki kembali normalisasi hubungan demi kepentingan domestik dan transformasi ekonomi jangka panjang.

Kedua, kegagalan intervensi militer dalam menyelesaikan konflik di Yaman, terutama oleh koalisi yang

dipimpin Arab Saudi sejak 2015, menjadi bukti bahwa pendekatan kekerasan tidak efektif dalam mencapai stabilitas jangka panjang. Meskipun memiliki keunggulan militer dan dukungan internasional, konflik justru berlarut-larut dan menimbulkan krisis kemanusiaan besar, dengan lebih dari 370.000 korban jiwa hingga 2022 menurut PBB, serta melemahnya posisi Saudi di kawasan. Ketidakmampuan militer untuk mengalahkan kelompok Houthi, yang didukung Iran, dan tekanan internasional atas bencana kemanusiaan, mendorong Arab Saudi dan Iran untuk mengubah strategi dari konfrontasi ke diplomasi, tercermin dalam kesepakatan normalisasi hubungan pada 2023 yang dimediasi oleh China (International Crisis Group, 2024). Kegagalan ini memperkuat kesadaran bahwa penyelesaian politik menjadi satu-satunya jalan realistik menuju perdamaian regional.

Ketiga, kekhawatiran bersama terhadap ancaman ekstremisme dan ketidakpastian atas keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah telah mendorong Arab Saudi dan Iran untuk mempercepat proses normalisasi hubungan. Kedua negara menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis yang menargetkan pemerintahan mereka, seperti al-Qaeda dan ISIS terhadap Arab Saudi, serta kelompok militan Sunni terhadap Iran. Selain itu, ketidakpastian atas komitmen keamanan AS di kawasan, terutama setelah penarikan pasukan dari Afghanistan dan fokus pada persaingan dengan China, telah mengurangi kepercayaan terhadap perlindungan AS, mendorong negara-negara regional untuk mencari solusi keamanan alternatif melalui kerja sama bilateral dan regional. Keempat, peran aktif China sebagai penengah memperlihatkan adanya dinamika geopolitik baru yang menekan kedua negara untuk menunjukkan citra yang lebih stabil dan kooperatif di mata dunia internasional (Al Jazeera, 2023).

Pada Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengejutkan dunia dengan mengumumkan normalisasi hubungan yang

dimediasi oleh Tiongkok (Ramadhani, 2024). Kesepakatan ini mencakup pembukaan kembali kedutaan besar, pemulihan hubungan ekonomi, dan kerja sama keamanan serta dimulainya kembali penerbangan langsung antara kota-kota utama kedua negara. Upaya diplomatik ini memberikan harapan bagi stabilitas regional dan mendukung implementasi *Saudi Vision 2030* (Dhea, 2024). Namun, dampak dari normalisasi ini terhadap keberlangsungan visi tersebut belum banyak dikaji secara komprehensif.

Meskipun normalisasi hubungan Arab Saudi-Iran memberikan peluang untuk memperkuat kerja sama di kawasan, masih terdapat celah analisis dalam memahami dampaknya terhadap keberlanjutan visi strategis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana normalisasi hubungan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik, investasi ekonomi, dan pembangunan regional yang menjadi pilar utama *Saudi Vision 2030*. Analisis ini penting untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kritis terhadap interaksi antara diplomasi, keamanan, dan pembangunan nasional di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini untuk melihat bagaimana Normalisasi Arab Saudi-Iran mendukung *Saudi Vision 2030*.

Kerangka Analisis

Teori Interdependensi Kompleks yang dikembangkan oleh (Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, 2012) dalam bukunya *Power and Interdependence* menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi melalui kekuatan militer (hard power), tetapi juga melalui kerja sama ekonomi, politik, dan sosial yang saling menguntungkan. Teori ini menekankan bahwa negara-negara dalam sistem internasional saling bergantung dalam berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Yang mana menciptakan hubungan yang jauh lebih rumit daripada sekadar

aliansi militer. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh globalisasi, hubungan antarnegara menjadi lebih kompleks, di mana interdependensi ekonomi, investasi, perdagangan, dan diplomasi memainkan peran yang sangat penting. Ketergantungan ini dapat menciptakan stabilitas di satu sisi, tetapi juga meningkatkan potensi konflik jika salah satu pihak merasa dirugikan atau terancam. Dalam sistem ini, konflik dan kerja sama seringkali berlangsung bersamaan, mencerminkan realitas bahwa negara-negara dapat bekerja sama dalam beberapa sektor sekaligus bersaing dalam sektor lain.

Secara spesifik, Keohane dan Nye mendefinisikan kerangka ini melalui tiga karakteristik utama yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor internasional saling terikat. Pertama, adanya *multiple channels* (saluran ganda), di mana interaksi tidak lagi terbatas pada hubungan antar-kepala negara, melainkan melibatkan elite birokrasi, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah yang beroperasi melintasi batas negara. Kedua, *absence of hierarchy among issues* (tidak adanya hierarki isu), yang berarti agenda keamanan militer tidak selalu mendominasi agenda ekonomi atau sosial; isu kesejahteraan dan perdagangan kini memiliki urgensi yang setara dengan isu keamanan. Ketiga, peran kekuatan militer yang kian minor dalam menyelesaikan konflik ekonomi atau interdependensi ekologis.

Aktor-aktor ini menjadi saling bergantung (*mutually dependent*) yang ditentukan oleh dua dimensi krusial: sensitivitas (*sensitivity*) dan vulnerabilitas (*vulnerability*). Sensitivitas mengacu pada seberapa cepat dan kuat dampak perubahan kebijakan di satu negara dirasakan oleh negara lain. Sementara itu, vulnerabilitas adalah dimensi yang lebih mendalam, yaitu besarnya biaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh suatu negara jika mereka harus memutuskan hubungan tersebut dan mencari alternatif kebijakan lain. Dalam konteks ini, negara menjadi bergantung bukan hanya karena

mereka 'terhubung', melainkan karena biaya untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut (biaya pemutusan) jauh lebih tinggi daripada biaya untuk mempertahankannya, sehingga memaksa terciptanya kerja sama yang pragmatis.

Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran bisa dipandang sebagai contoh interdependensi kompleks, di mana kedua negara meskipun memiliki persaingan geopolitik, tetap memiliki kepentingan bersama yang saling terkait, terutama dalam menciptakan stabilitas regional. Stabilitas ini menjadi krusial bagi *Saudi Vision 2030*, yang berfokus pada diversifikasi ekonomi Arab Saudi dan menarik investasi asing untuk mendukung berbagai proyek besar. Dalam konteks ini, kerjasama ekonomi antara Saudi dan Iran berpotensi menciptakan momentum bagi keduanya untuk memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global, dengan saling mendukung di bidang energi, investasi, dan keamanan regional. Sebaliknya, ketegangan yang muncul karena perbedaan politik atau ideologi dapat mengancam kestabilan yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan strategi ekonomi *Saudi Vision 2030*.

Metode

Artikel ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses pengumpulan data mengandalkan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode untuk menghimpun informasi dari beragam sumber tertulis yang relevan sebagai landasan teoretis (Sugiyono, 2019). Seluruh data yang digunakan bersifat kualitatif yang bersumber dari data sekunder, mencakup informasi berbentuk narasi atau teks yang dihimpun dari dokumen resmi, laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dan analisis media (Moloeng, 2018). Penggunaan sumber sekunder ini ditujukan untuk membangun pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

Data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang prosesnya meliputi reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Guna menjamin validitas dan kredibilitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan teknik keabsahan data berupa triangulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014), triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat temuan, meningkatkan akurasi, serta mengurangi potensi bias dalam interpretasi data.

Pembahasan

Normalisasi hubungan diplomatik antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran pada Maret 2023 merepresentasikan suatu pergeseran paradigmatik dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah. Fenomena ini, apabila dianalisis melalui kerangka konseptual Teori Interdependensi (Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, 2012) dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari kalkulasi strategis di mana biaya konflik yang berkelanjutan dinilai melampaui potensi keuntungannya. Bagi Arab Saudi, langkah ini secara inheren terhubung dengan imperatif untuk merealisasikan agenda transformasi nasional, *Saudi Vision 2030*, yang mensyaratkan stabilitas regional sebagai kondisi fundamental. Pembahasan berikut akan mengurai dampak normalisasi ini melalui empat dimensi interdependensi: ekonomi, energi, politik-keamanan, dan sosial-budaya.

Interdependensi Ekonomi

Ketergantungan ekonomi timbal balik antara Arab Saudi dan Iran menjadi pendorong utama di balik proses normalisasi. Stabilitas regional yang diupayakan melalui langkah diplomatik ini dipandang sebagai prasyarat esensial untuk

menarik arus Investasi Asing Langsung yang menjadi tulang punggung pendanaan Saudi Vision 2030, sekaligus membuka ruang bagi ekspansi ekonomi Iran yang terhambat oleh sanksi internasional.

Sebelum normalisasi, rivalitas geopolitik antara Riyadh dan Teheran telah menciptakan persepsi risiko yang tinggi di kalangan investor global, yang dibuktikan oleh serangan terhadap fasilitas minyak Aramco pada 2019 dan ketegangan di Selat Hormuz. Kondisi ini menjadi penghalang signifikan bagi Arab Saudi dalam mencapai target FDI sebesar \$100 miliar per tahun, sementara realisasinya pada 2020 hanya sekitar \$5,5 miliar 2030 (Saudi Vision 2030, 2016). Dengan mereduksi sumber utama ketidakpastian regional, normalisasi diharapkan dapat menurunkan premi risiko dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek mega (giga-projects) yang menjadi sentral bagi Visi 2030, seperti NEOM—sebuah kota futuristik senilai \$500 miliar (Iptek Digital, 2023), *The Red Sea Project*, dan Qiddiya. Proyek-proyek ini, yang dimotori oleh *Public Investment Fund* (PIF) dengan estimasi aset melampaui \$925 miliar (Gareta, 2018), secara inheren membutuhkan partisipasi modal internasional dalam skala masif.

Penting untuk diklarifikasi bahwa modal asing ini tidak diproyeksikan datang dari Iran, mengingat keterbatasan ekonomi Teheran akibat sanksi internasional. Peran Iran dalam ekosistem investasi ini adalah sebagai variabel penentu stabilitas keamanan (*security guarantor*). Dukungan Iran terhadap Vision 2030 terwujud melalui penghentian aksi destabilisasi kawasan dan jaminan keamanan infrastruktur energi. Dengan hilangnya ancaman serangan fisik dari proksi Iran, persepsi risiko negara (*country risk*) Arab Saudi menurun drastis.

Peningkatan stabilitas regional diproyeksikan akan memperkuat tren positif aliran FDI ke Arab Saudi, yang pada

2023 tercatat sebesar \$22,8 miliar (World Bank, 2023), dan meningkatkan daya saing proyek-proyek tersebut di pasar modal global (A. Fayyad dan K. Abed, 2024). Meskipun demikian, interdependensi ini juga memunculkan kerentanan. Keterikatan dengan Iran yang masih berada di bawah sanksi internasional yang ekstensif dapat membatasi pilihan Arab Saudi dalam menjalin kemitraan investasi dan teknologi dengan entitas Barat. Lebih jauh, persepsi risiko laten tetap eksis akibat sejarah panjang antagonisme, di mana eskalasi konflik regional, seperti yang terjadi antara Iran dan Israel pada April 2024, dapat secara tiba-tiba merusak iklim investasi yang telah dibangun. Potensi Iran sebagai pesaing langsung dalam menarik FDI pasca-pencabutan sanksi juga menjadi variabel yang perlu diperhitungkan dalam strategi ekonomi jangka panjang Kerajaan.

Normalisasi hubungan berpotensi menjadi katalisator signifikan bagi agenda diversifikasi ekonomi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor hidrokarbon, yang secara historis menyumbang sekitar 42% dari PDB negara tersebut (World Bank, 2023). Sebelum normalisasi, rivalitas politik menciptakan pasar regional yang terfragmentasi dan menghambat perdagangan bilateral, yang volumenya hanya mencapai \$14 juta pada 2021. Pemulihan hubungan diplomatik membuka peluang untuk menjadikan Iran, dengan populasi 88 juta jiwa (World Bank, 2023), sebagai pasar tujuan ekspor non-minyak bagi Arab Saudi. Selain itu, stabilitas di Teluk Persia merupakan prasyarat mutlak bagi ambisi Visi 2030 untuk mentransformasikan Arab Saudi menjadi pusat logistik global (Saudi Vision 2030, 2016). Berkurangnya ancaman di Selat Hormuz akan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperkuat posisi pelabuhan-pelabuhan Saudi. Revitalisasi sektor pariwisata, khususnya pariwisata religi, juga akan menerima dampak positif langsung. Dibukanya kembali perjalanan umrah bagi jemaah Iran pada Desember 2023 setelah

terhenti selama delapan tahun akan berkontribusi pada target *Saudi Vision 2030* untuk meningkatkan jumlah pengunjung umrah secara drastic (Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya , 2021).

Namun, kerentanan juga muncul dari interdependensi ini. Prioritas dan struktur ekonomi yang berbeda antara kedua negara dapat menyulitkan sinkronisasi kerja sama. Keterlibatan yang erat dengan ekonomi Iran yang tersanksi dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian Arab Saudi dari pasar global yang lebih stabil, serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Barat yang dapat membatasi akses terhadap teknologi canggih yang esensial untuk diversifikasi.

Sebagai dua produsen energi utama dunia, Arab Saudi dan Iran memiliki kepentingan fundamental yang saling terkait dalam menjaga stabilitas pasar energi global dan keamanan jalur pasokan. Normalisasi hubungan merefleksikan kepentingan bersama ini dan membuka dimensi baru bagi kerja sama di sektor energi terbaru. Normalisasi hubungan diplomatik memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas pasar minyak global, meskipun data ekspor pasca-normalisasi belum menunjukkan korelasi langsung. Penurunan produksi Arab Saudi menjadi 9 juta bph merupakan bagian dari strategi OPEC+, sementara peningkatan ekspor Iran hingga 1,8 juta bph lebih didorong oleh permintaan dari Tiongkok. Dinamika kontradiktif ini secara langsung mengubah peta neraca perdagangan energi. Di satu sisi, pemangkasan produksi oleh Arab Saudi membatasi volume ketersediaan minyak di pasar formal, yang bertujuan menjaga stabilitas harga global agar tidak anjlok. Di sisi lain, lonjakan ekspor Iran mengisi celah pasokan melalui jalur informal (*grey market*), memberikan opsi minyak dengan harga diskon bagi importir besar seperti Tiongkok. Hal ini memungkinkan pasar tetap terasupai tanpa merusak struktur harga yang sedang dipertahankan oleh Saudi.

Meskipun demikian, dampak yang lebih substansial bersifat geopolitis. Menurut kerangka Teori Interdependensi Energi (Yergin, 2011), kerja sama antar-produsen utama dapat memitigasi risiko konflik. Normalisasi ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kohesi kebijakan dalam OPEC+ (OPEC, 2023) dan mengurangi "premi risiko perang" pada harga minyak (Antaraneews, 2023). Keamanan di Selat Hormuz, jalur transit bagi sekitar 20% pasokan minyak global (EIA, 2022), meningkat secara signifikan, yang memberikan jaminan pasokan lebih besar bagi konsumen dan mengurangi biaya pengiriman bagi produsen (Khatib, 2023).

Namun, terdapat pula dampak negatif potensial. Apabila sanksi terhadap Iran dicabut, peningkatan produksi dan ekspor Iran dapat memicu persaingan ketat yang berisiko menekan harga minyak global dan memengaruhi pendapatan Arab Saudi yang krusial untuk pendanaan *Saudi Vision 2030*. Ketergantungan pada mitra yang berstatus tersanksi juga dapat membatasi akses Arab Saudi terhadap investasi dan teknologi energi dari pihak ketiga.

Normalisasi membuka peluang baru untuk kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, sejalan dengan tujuan Visi 2030 untuk mencapai kapasitas 58,7 GW pada 2030 (Saudi Vision 2030, 2016). Kedua negara memiliki potensi energi surya dan angin yang masif. Hubungan yang membaik dapat memfasilitasi pertukaran keahlian teknis, harmonisasi kebijakan energi regional, hingga penajakan proyek energi terbarukan lintas batas. Peningkatan produksi energi bersih akan memungkinkan kedua negara mengurangi konsumsi domestik bahan bakar fosil, sehingga dapat mengalihkannya untuk ekspor yang lebih profitabel.

Meskipun demikian, risiko tetap ada. Keterlibatan yang erat dengan Iran dapat menghambat kolaborasi Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan teknologi energi terbarukan dari Barat yang enggan berasosiasi dengan entitas yang terkena

sanksi. Tantangan utamanya terletak pada rezim sanksi sekunder (*secondary sanctions*) Amerika Serikat. Normalisasi ini menempatkan Riyadh dalam posisi dilematis: di satu sisi, stabilitas regional dibutuhkan untuk investasi, namun di sisi lain, integrasi ekonomi yang terlalu dalam dengan Teheran berisiko memicu 'risiko kepatuhan' (*compliance risk*) bagi mitra Barat. Perusahaan multinasional Barat, yang menjadi penyedia teknologi utama bagi Vision 2030, terikat pada regulasi ketat yang melarang interaksi dengan rantai pasok yang terafiliasi dengan Iran. Jika proyek-proyek Saudi terindikasi memfasilitasi penghindaran sanksi bagi Iran, hal ini dapat memicu penarikan diri investor Barat atau pembatasan transfer teknologi sensitif. Perbedaan skala proyek dan prioritas industri juga dapat mempersulit efisiensi kerja sama, berpotensi mengalihkan sumber daya dari fokus utama *Saudi Vision 2030*.

Interdependensi Politik dan Keamanan

Dimensi politik dan keamanan merupakan fondasi dari proses normalisasi, di mana stabilitas regional tidak lagi dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai prasyarat eksistensial bagi keberlangsungan *Saudi Vision 2030*. Sebelum normalisasi, rivalitas Saudi-Iran menjadi sumber utama destabilisasi regional, termanifestasi dalam konflik proksi di Yaman, Suriah, dan Irak (International Crisis Group, 2023). Konflik-konflik ini menguras sumber daya finansial Arab Saudi dalam jumlah masif (Al-Rasheed, 2020) dan merusak citra internasionalnya, yang kontraproduktif dengan upaya nation branding di bawah *Saudi Vision 2030* (Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya, 2021). Normalisasi, yang dimediasi oleh Tiongkok, merupakan pengakuan bahwa biaya konfrontasi telah melampaui manfaatnya. Langkah ini telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam mendorong dialog yang lebih konstruktif untuk penyelesaian konflik di Yaman (International Crisis Group, 2024). Stabilitas regional yang lebih baik secara

langsung meningkatkan kepercayaan investor (Driessen, 2023) dan mengamankan jalur perdagangan energi (EIA, 2022). Di arena multilateral, normalisasi diharapkan dapat meningkatkan kohesi di dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan membuka platform kerja sama baru di forum non-Barat seperti BRICS dan SCO.

Akan tetapi, kerentanan interdependensi politik-keamanan juga signifikan. Normalisasi berisiko membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri Arab Saudi, yang mungkin merasa tertekan untuk tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kepentingan Teheran. Dilema ini bersifat resiprokal. Sebagaimana Riyadh membatasi retorikanya demi keamanan fisik, Teheran juga menghadapi batasan serupa dalam hal manuver geopolitik. Iran terpaksa menahan agresivitas proksi regionalnya demi menjaga kanal diplomatik dengan Arab Saudi tetap terbuka. Bagi Teheran, rusaknya normalisasi ini akan berkonsekuensi pada kembalinya isolasi politik yang parah di kawasan Timur Tengah, sebuah risiko yang tidak mampu mereka tanggung di tengah krisis legitimasi domestik dan tekanan ekonomi. Kepercayaan yang masih rapuh menyiratkan bahwa insiden keamanan sekecil apa pun dapat memicu eskalasi kembali. Kapasitas Iran untuk melakukan eskalasi militer langsung, seperti yang ditunjukkan pada April 2024, menjadi pengingat konstan akan kerapuhan stabilitas yang baru terbangun. Isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan juga tetap menjadi sumber ketidakpastian keamanan fundamental yang dapat membatalkan semua kemajuan diplomatik. Pada ranah multilateral, normalisasi hubungan berpotensi mentransformasi dinamika keterlibatan kedua negara, dari yang sebelumnya berperan sebagai rival yang kerap melumpuhkan forum menjadi mitra yang lebih konstruktif. Sebelum pemulihan hubungan, persaingan keduanya seringkali menyebabkan kebuntuan di dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan meredanya friksi,

efektivitas organisasi-organisasi seperti OKI dan OPEC+ diharapkan dapat meningkat secara signifikan, memungkinkan Arab Saudi untuk memproyeksikan citra kepemimpinan regional yang lebih kuat dan kohesif. Selain itu, keterlibatan bersama dalam platform non-Barat seperti BRICS dan SCO membuka koridor baru untuk kerja sama strategis yang sejalan dengan diversifikasi kebijakan luar negeri Riyadh. Akan tetapi, potensi ini tetap dibatasi oleh tantangan yang substansial, termasuk risiko timbulnya kekhawatiran dari aliansi-aliansi tradisional Arab Saudi dan kesulitan yang akan terus ada dalam mencapai konsensus pada isu-isu sensitif akibat perbedaan ideologis dan kepentingan nasional yang fundamental.

Interdependensi Sosial dan Budaya

Normalisasi hubungan diplomatik secara fundamental membuka kembali saluran interaksi sosial dan budaya antar-masyarakat yang telah lama terputus, sebuah elemen penting untuk mendukung pilar "Masyarakat yang Dinamis" dalam *Saudi Vision 2030*. Dampak paling konkret dari normalisasi adalah peningkatan mobilitas masyarakat, terutama untuk tujuan religi. Setelah terhenti total sejak 2016 (Al Jazeera, 2016), perjalanan umrah bagi warga negara Iran telah dibuka kembali pada Desember 2023 (Saudi Gazette, 2023), dengan ribuan jemaah telah melaksanakan ibadah pada 2024. Arus peziarah ini akan berkontribusi langsung pada pencapaian target *Saudi Vision 2030* untuk menampung 30 juta jemaah umrah per tahun (Saudi Vision 2030, 2016) dan menstimulasi sektor pariwisata, perhotelan, serta ritel di kota-kota suci. Di sisi lain, Iran juga telah memberlakukan kebijakan pembebasan visa bagi warga Arab Saudi (Saudi Gazette, 2023), yang mengindikasikan itikad baik untuk mendorong interaksi timbal balik. Peningkatan kontak antar-warga ini berpotensi untuk secara gradual mengurangi stereotip negatif dan membangun pemahaman

bersama, yang merupakan fondasi sosial bagi perdamaian berkelanjutan.

Walaupun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan di tingkat elit dan penerimaan di tingkat masyarakat. Warisan ketidakpercayaan yang ditanamkan selama puluhan tahun melalui narasi permusuhan tidak dapat dihilangkan secara instan. Sikap pragmatis Riyadh dalam menavigasi isu-isu regional dapat menimbulkan dilema di ranah domestik (Arab Center Washington DC, 2025). Selain itu, kendala ekonomi akibat sanksi internasional yang berkelanjutan terhadap Iran secara praktis membatasi kapasitas warganya untuk melakukan perjalanan internasional secara masif. Pembangunan interdependensi sosial-budaya yang otentik dan kuat akan menjadi proses yang bertahap dan kompleks, yang memerlukan lebih dari sekadar pemulihan hubungan diplomatik formal.

Normalisasi hubungan merepresentasikan suatu perubahan paradigma diplomasi Arab Saudi, yang secara sadar bergeser dari pendekatan konfrontasi ideologis menuju pragmatisme yang berorientasi pada pembangunan. Langkah ini didorong oleh kalkulasi bahwa agenda transformatif *Saudi Vision 2030* mustahil tercapai tanpa adanya stabilitas regional. Mediasi yang difasilitasi oleh Tiongkok menjadi penanda signifikan dari strategi Riyadh untuk mendiversifikasi kemitraan global, mengurangi dependensi historis terhadap aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, dan membangun otonomi strategis. Upaya de-eskalasi ini secara praktis telah membuahkan hasil dalam meredam konflik proksi, salah satunya terlihat pada kemajuan dialog di Yaman. Meskipun demikian, pendekatan baru ini bukannya tanpa risiko, terdapat potensi pembatasan fleksibilitas kebijakan luar negeri Arab Saudi serta munculnya kerentanan reputasi akibat asosiasi diplomatik yang lebih erat dengan negara yang masih dikenai sanksi internasional.

Kesimpulan

Normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada Maret 2023 merupakan sebuah langkah strategis yang didasari oleh kalkulasi pragmatis bahwa biaya instabilitas regional lebih besar daripada manfaat persaingan. Berdasarkan Teori Interdependensi Kompleks, pemulihan hubungan ini menjadi fondasi krusial bagi keberlangsungan *Saudi Vision 2030*.

Secara positif, normalisasi ini meningkatkan iklim investasi asing langsung untuk proyek-proyek mega, menstabilkan pasar energi melalui koordinasi OPEC+ dan keamanan Selat Hormuz, serta mereduksi konflik proksi yang memperbaiki citra internasional Arab Saudi. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat, seperti dibukanya kembali perjalanan umrah bagi jemaah Iran, secara langsung mendukung sektor pariwisata.

Meskipun demikian, masih memungkinkan adanya risiko yang signifikan. Di bidang ekonomi dan energi, ketergantungan pada Iran yang masih terbebani sanksi membatasi pilihan mitra dan dapat mengancam dominasi pasar Arab Saudi di masa depan. Dalam politik dan keamanan, terdapat risiko pembatasan otonomi kebijakan luar negeri Riyadh dan kekhawatiran dari aliansi tradisional. Kepercayaan yang rapuh, yang dapat terganggu oleh eskalasi regional seperti serangan Iran-Israel pada April 2024, menjadi tantangan laten di semua sektor. Pada aspek sosial, kebijakan pemerintah belum tentu selaras dengan persepsi publik yang masih dibayangi ketidakpercayaan historis.

Dengan demikian, normalisasi hubungan ini adalah pilar esensial yang menopang ambisi *Saudi Vision 2030*, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola secara cermat berbagai risiko dan tantangan kompleks yang menyertainya.

Daftar Pustaka

- A. Fayyad dan K. Abed. (2024). Geopolitical Risks and Foreign Direct Investment in the Middle East. *Journal of Economic Development and Regional Integration*, 45-62.
- Al Jazeera. (2023, Maret 10). Retrieved from Iran and Saudi Arabia agree to restore diplomatic ties in China-brokered deal: <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/iran-and-saudi-arabia-agree-to-restore-diplomatic-ties-in-china-brokered-deal>
- Al Jazeera. (2016, Januari 7). *Saudi Arabia cuts diplomatic ties with Iran*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2016/1/7/saudi-arabia-cuts-diplomatic-ties-with-iran>
- Al-Rasheed, M. (2020). *Saudi Arabia's Vision 2030: Challenges and Opportunities*. I.B. Tauris.
- Antaranews. (2023, Maret 12). *Normalisasi hubungan diplomatik Iran-Saudi dan implikasinya*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3436986/normalisasi-hubungan-diplomatik-iran-saudi-dan-implikasinya>
- Arab Center Washington DC. (2025). *Israel-Iran Confrontation Tests Saudi Arabia's Quest for Neutrality*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dhea, S. (2024). *Universitas Andalas Repository*. Retrieved from *Analisi Kebijakan Arab Saudi dalam Normalisasi Hubungan dengan Iran*: <http://scholar.unand.ac.id/476746/>
- Driessen, A. (2023, April 20). *Saudi-Iran Rapprochement and Regional Stability: Implications for FDI*. Middle East Economic Digest (MEED).
- EIA. (2022). *World Oil Transit Chokepoints: Strait of Hormuz*. U.S. Energy Information Administration. Retrieved from

- <https://www.eia.gov/international/analysis/regions-profiles/world/world-oil-transit-chokepoints/>
- Gareta, S. P. (2018, Maret 6). *Antara News*. Retrieved from Arab Saudi dan Mesir sepakati pembangunan megaprojek NEOM:
<https://www.antaranews.com/view/690620/arab-saudi-dan-mesir-sepakati-pembangunan-megaprojek-neom>
- Haryono, W. (2024, Desember 11). *Motronews*. Retrieved from Mengurai Konflik Timur Tengah: Dampak dan Implikasinya terhadap Stabilitas Global:
<https://www.metrotvnews.com/read/kWDCZ2O1-mengurai-konflik-timur-tengah-dampak-dan-implikasinya-terhadap-stabilitas-global>
- Ihsan Hamid dan Adi Setiawan. (2021). Arab Saudi dan Iran: Kontestasi Ideologi dan Dampaknya di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 129-139.
- International Crisis Group*. (2024, Januari 15). Retrieved from Finding a Path to Peace in Yemen's War:
<https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/finding-path-peace-yemens-war>
- Khatib, L. (2023, April 5). *The Saudi-Iran Deal and the Future of Middle East Security*. Chatham House. Retrieved from <https://www.chathamhouse.org/2023/04/saudi-iran-deal-and-future-middle-east-security>
- Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya . (2021). Saudi Vision 2030 dalam Membangun . *Journal of Islamic World and Politics*, 160-178.
- Moloeng, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, A. Z. (2023). Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran dalam Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Review Politik (JPP)*, 13(2).

- OPEC. (2023). *OPEC Monthly Oil Market Report*.
- Quamar, M. M. (2020). *Education System in Saudi Arabia: Of Change and Reform*. Palgrave Macmillan.
- Ramadhani, K. W. (2024). *UNP Veteran Yogyakarta Repository*. Retrieved from Normalisasi Hubungan Diplomati Arab Saudi-Iran tahun 2023.
- Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. (2012). *Power and Interdependence*. Boston: Longman.
- Sahide, A. (2013). *Ketegangan Politik Syiah-Sunni di Timur Tengah*. Phinisi Press.
- Saudi Gazette. (2023, Desember 14). *Iran waives visa rules for Saudi Arabia and other 32 countries*. Retrieved from <https://saudigazette.com.sa/article/638691>
- Saudi Vision 2030. (2016). Retrieved from The Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030: <https://www.vision2030.gov.sa/en/overview>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A*. Alfabeta.
- World Bank. (2023). Retrieved from Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)-Saudi Arabia: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=SA>
- World Bank. (2023). Retrieved from The World Bank in Saudi Arabia: Overview: <https://www.worldbank.org/en/country/saudiarabia/overview>
- World Bank. (2023). Retrieved from The World Bank in Islamic Republic of Iran: Overview: <https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview>
- Yergin, D. (2011). *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World*. Penguin Press.

